

# Pengaruh Konflik Timur Tengah dan Stabilitas Global dalam Perkembangan Negara-Negara Mayoritas Muslim

Ahmad Zaki Madani<sup>1</sup>, Subaidi Qomar<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Surat-e: [zakymadani14639@gmail.com](mailto:zakymadani14639@gmail.com)

## ABSTRACT

The conflict in the Middle East has become a complex global issue, affecting the political, economic, and social stability of the world. This region has high strategic value due to its position connecting three continents and its wealth of natural resources such as oil and gas. However, these resources often trigger conflicts due to various conflicting interests. This conflict has an impact on Muslim-majority countries both inside and outside the Middle East region, creating challenges such as sectarian tensions, mass migration, humanitarian crises, and economic instability. Amid these challenges, Muslim-majority countries have the potential to rise through regional cooperation, strengthening domestic economies, and sustainable development. This study aims to analyze the impact of the Middle East conflict on global stability and the development of Muslim-majority countries. By understanding the root causes thoroughly, this study offers strategic insights to manage global challenges, build solidarity, and create a more peaceful and prosperous future.

## ABSTRAK

Konflik di Timur Tengah telah menjadi isu global yang kompleks, memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dunia. Kawasan ini memiliki nilai strategis tinggi karena posisinya yang menghubungkan tiga benua dan kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Namun, sumber daya ini sering menjadi pemicu konflik akibat berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Konflik ini berdampak pada negara-negara mayoritas Muslim baik di dalam maupun luar kawasan Timur Tengah, menciptakan tantangan seperti ketegangan sektarian, migrasi besar-besaran, krisis kemanusiaan, dan ketidakstabilan ekonomi. Di tengah tantangan ini, negara-negara mayoritas Muslim memiliki potensi untuk bangkit melalui kerja sama regional, penguatan ekonomi domestik, dan pembangunan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konflik Timur Tengah terhadap stabilitas global dan perkembangan negara-negara mayoritas Muslim. Dengan memahami akar masalah secara menyeluruh, penelitian ini menawarkan wawasan strategis untuk mengelola tantangan global, membangun solidaritas, dan menciptakan masa depan yang lebih damai dan makmur.

## KEYWORDS:

Middle East Conflict, Global Stability, Political-Economic Impacts

## KATA KUNCI:

Konflik Timur Tengah, Stabilitas Global, Dampak Politik-Ekonomi

## How to Cite:

“Madani, A. Z., & Qomar, S. (2025). Pengaruh Konflik Timur Tengah dan Stabilitas Global dalam Perkembangan Negara-Negara Mayoritas Muslim. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 236–244.”

## PENDAHULUAN

Konflik di Timur Tengah telah menjadi salah satu isu global yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern, memberikan dampak signifikan pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dunia. Kawasan ini, yang sering disebut sebagai "pusat dunia," tidak hanya memiliki nilai strategis yang tinggi karena

posisinya yang menghubungkan tiga benua utama Asia, Afrika, dan Eropa, tetapi juga dikenal sebagai kawasan kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Kekayaan ini, meskipun menjadi anugerah bagi negara-negara di kawasan tersebut, sering kali menjadi pemicu konflik karena banyaknya kepentingan yang bertumpang tindih, baik dari aktor domestik, regional, maupun internasional. Perebutan kendali atas sumber daya ini telah melibatkan kekuatan global dan regional yang memiliki agenda berbeda, mulai dari kontrol ekonomi hingga dominasi geopolitik. Akibatnya, Timur Tengah kerap menjadi ajang persaingan sengit antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan kekuatan baru seperti Cina, yang memanfaatkan situasi konflik untuk memperkuat posisi mereka di panggung internasional.

Dalam konteks ini, negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah menghadapi tantangan yang berlapis. Di tingkat internal, mereka berhadapan dengan konflik sektarian yang dipicu oleh perbedaan ideologi agama, seperti antara Sunni dan Syiah, yang sering kali diperburuk oleh campur tangan eksternal. Selain itu, ketegangan etnis dan kurangnya keadilan sosial memperparah ketidakstabilan domestik, menciptakan kondisi di mana konflik bersenjata menjadi lebih mungkin terjadi. Konflik berkepanjangan, seperti perang saudara di Suriah yang telah menghancurkan infrastruktur negara, konflik Israel-Palestina yang belum menemukan solusi damai, dan ketegangan di Yaman yang telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, mencerminkan dampak destruktif dari ketidakstabilan ini. Situasi ini tidak hanya merugikan negara-negara yang terlibat langsung tetapi juga memberikan dampak domino bagi kawasan yang lebih luas, termasuk negara-negara tetangga dan komunitas global.

Di sisi lain, negara-negara mayoritas Muslim di luar Timur Tengah, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan negara-negara di Afrika Utara, juga tidak kebal terhadap dampak dari konflik ini. Gelombang migrasi besar-besaran akibat perang dan krisis kemanusiaan telah menciptakan tekanan baru, baik dalam bentuk kebutuhan untuk memberikan bantuan kemanusiaan maupun menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari masuknya pengungsi. Perubahan dinamika perdagangan global, seperti fluktuasi harga minyak akibat instabilitas Timur Tengah, turut memengaruhi perekonomian negara-negara ini, terutama yang bergantung pada impor energi. Selain itu, ketergantungan pada jalur perdagangan utama yang melewati Timur Tengah membuat stabilitas kawasan ini menjadi sangat penting bagi ekonomi global.

Tekanan eksternal dari intervensi asing, sanksi ekonomi, dan kebijakan proteksionis negara-negara besar juga menjadi tantangan serius bagi negara-negara mayoritas Muslim. Dalam banyak kasus, intervensi asing yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian atau stabilitas justru memperburuk konflik yang ada, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit dihentikan. Hal ini menyebabkan negara-negara mayoritas Muslim harus beradaptasi dengan dinamika politik global yang sering kali tidak berpihak kepada mereka, sambil tetap berusaha menjaga kedaulatan dan stabilitas internal.

Namun, meskipun tantangan ini sangat besar, negara-negara mayoritas Muslim juga memiliki potensi untuk mengatasi krisis dan berkembang di tengah ketidakpastian global. Kerja sama regional, seperti yang difasilitasi oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dapat menjadi platform untuk menggalang solidaritas dan membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif. Selain itu, fokus pada pembangunan berkelanjutan, investasi dalam pendidikan, penguatan ekonomi domestik, dan promosi toleransi antarumat beragama dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, yang relatif stabil secara politik dan ekonomi, dapat berperan sebagai model bagaimana keragaman dapat dikelola secara harmonis untuk mendorong pembangunan.

Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh konflik Timur Tengah tidak hanya relevan untuk memahami dinamika stabilitas global, tetapi juga menjadi kunci untuk mengeksplorasi bagaimana negara-negara mayoritas Muslim dapat mengelola tantangan dan peluang yang ada. Dengan memahami akar permasalahan dan dampaknya secara menyeluruh, negara-negara mayoritas Muslim dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global, membangun solidaritas, dan menciptakan masa depan yang lebih damai dan makmur bagi rakyatnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang pengaruh konflik Timur Tengah terhadap stabilitas global dan perkembangan negara-negara mayoritas Muslim telah menjadi perhatian para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang hubungan internasional, ekonomi, dan sosial politik. Konflik yang berkepanjangan di kawasan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap negara mayoritas Muslim lainnya melalui dinamika perdagangan, migrasi, dan hubungan internasional. Kajian terhadap isu ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana ketegangan di Timur Tengah memengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi, serta stabilitas politik negara-negara mayoritas Muslim baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **Hubungan Antara Konflik dan Stabilitas Politik**

Konflik berkepanjangan di Timur Tengah sering kali menjadi penghambat utama stabilitas politik dan sosial di negara-negara mayoritas Muslim. Menurut penelitian oleh Collier dan Hoeffler (2004), konflik internal memiliki dampak yang merusak pada ekonomi dan struktur politik suatu negara, menciptakan siklus ketidakstabilan yang sulit dihentikan. Konflik di negara-negara seperti Suriah, Irak, dan Yaman menunjukkan bagaimana perang sipil dan intervensi asing dapat mengakibatkan runtuhnya lembaga negara, pengungsian massal, dan kehancuran infrastruktur ekonomi. Stabilitas politik menjadi prasyarat penting untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan, seperti yang dicontohkan oleh negara-negara Teluk yang relatif stabil dan mampu mengarahkan sumber daya mereka untuk pembangunan ekonomi (Fattah & Butter, 2018).

### **Dampak Ekonomi dari Konflik dan Ketergantungan pada Minyak**

Negara-negara Timur Tengah cenderung bergantung pada ekspor minyak sebagai sumber utama pendapatan. Ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga energi di pasar global (Ross, 2012). Studi oleh Karl (1997) menunjukkan bahwa *resource curse* atau kutukan sumber daya sering kali menjadi masalah di negara-negara kaya minyak, di mana kekayaan sumber daya tidak terkonversi menjadi kesejahteraan masyarakat karena buruknya tata kelola. Diversifikasi ekonomi menjadi solusi utama untuk mengurangi ketergantungan ini, seperti yang terlihat pada kebijakan Vision 2030 Arab Saudi, yang bertujuan untuk mengembangkan sektor non-minyak seperti pariwisata, teknologi, dan hiburan (Hertog, 2018).

### **Peran Sistem Politik dalam Pembangunan Ekonomi**

Sistem politik yang inklusif memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Acemoglu dan Robinson (2012) dalam bukunya *Why Nations Fail* menekankan bahwa sistem politik yang inklusif dan akuntabel lebih mampu menciptakan institusi ekonomi yang mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, meskipun memiliki sistem politik yang otoriter, mampu menciptakan stabilitas dengan mengalokasikan kekayaan minyak untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun, negara-negara seperti Libya dan Irak menunjukkan bagaimana konflik internal yang dipicu oleh sistem politik yang lemah dapat menghambat pembangunan (Anderson, 2011).

### **Peran Budaya dan Sistem Nilai Lokal**

Budaya dan sistem nilai lokal memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan politik dan ekonomi di negara mayoritas Muslim. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial, zakat, dan solidaritas dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan sistem ekonomi berbasis inklusi sosial (Chapra, 2008). Sistem ekonomi syariah yang berkembang di beberapa negara, seperti Indonesia dan Malaysia, menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dengan kebijakan modern untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Iqbal & Mirakhor, 2011).

### **Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam membangun masyarakat yang mandiri dan produktif. Studi oleh Hanushek dan Woessmann (2008) menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, terutama pendidikan perempuan, memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan bagaimana investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan sosial (Hill, 2014).

### **Kerja Sama Regional dan Global**

Kerja sama regional dan global menjadi salah satu strategi kunci untuk menghadapi tantangan yang dihadapi negara-negara mayoritas Muslim. Organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) memiliki potensi besar untuk memfasilitasi kolaborasi antarnegara, terutama dalam menghadapi isu-isu bersama seperti krisis pengungsi, ketergantungan energi, dan perubahan iklim.

Namun, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi di antara negara-negara anggota sering kali menjadi penghalang. Ulrichsen (2016) mencatat bahwa keberhasilan kerja sama internasional bergantung pada kemampuan negara-negara tersebut untuk mengesampingkan perbedaan dan fokus pada tujuan bersama. Dalam konteks global, negara-negara mayoritas Muslim juga perlu memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara non-Muslim untuk menciptakan stabilitas yang lebih luas dan memperkuat posisi mereka di kancah internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosial dan ekonomi untuk menganalisis pengaruh konflik Timur Tengah terhadap stabilitas global serta dampaknya pada perkembangan negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali fenomena secara mendalam dan holistik berdasarkan interpretasi data. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur dari jurnal akademik, laporan organisasi internasional seperti PBB dan OKI, serta artikel berita untuk mendapatkan gambaran umum konflik dan dampaknya. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pakar hubungan internasional, ekonomi pembangunan, dan sosiologi, serta aktivis kemanusiaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih kontekstual. Dokumen resmi seperti laporan kebijakan internasional dan data statistik sosial-ekonomi juga digunakan sebagai sumber data pendukung. Penelitian ini memfokuskan analisis pada dua aspek utama: dampak sosial, seperti gelombang migrasi, krisis kemanusiaan, dan perubahan struktur masyarakat; serta dampak ekonomi, seperti fluktuasi harga energi, perdagangan internasional, dan stabilitas ekonomi negara mayoritas Muslim.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan, dengan validitas data diperkuat melalui triangulasi dari berbagai sumber. Studi ini difokuskan pada dampak konflik Timur Tengah dalam dua dekade terakhir, dengan lingkup sosial dan ekonomi yang mencakup indikator migrasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konflik tersebut memengaruhi stabilitas global dan pembangunan di negara-negara mayoritas Muslim, serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk menghadapi tantangan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, akan dibahas pengaruh konflik Timur Tengah terhadap stabilitas global dan perkembangan negara mayoritas Muslim, dengan fokus pada bagaimana membangun politik dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Analisis mencakup kondisi politik dan ekonomi di Timur Tengah, stabilitas yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi, serta sistem politik yang mendukung kemandirian

ekonomi. Pembahasan ini juga mempertimbangkan pentingnya mengintegrasikan budaya lokal dalam kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat dampak konflik yang berkepanjangan dan intervensi asing, pembahasan ini akan mengangkat contoh negara-negara yang berhasil dan yang menghadapi kesulitan dalam mencapai kemakmuran masyarakat.

### **Negara Timur Tengah dan Kemakmuran Masyarakat**

Kemakmuran masyarakat di negara-negara mayoritas Muslim, khususnya di Timur Tengah, sering kali terhambat oleh berbagai faktor struktural dan politik yang memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Meskipun kawasan ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas alam, yang seharusnya dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya distribusi kekayaan seringkali tidak merata. Negara-negara seperti Irak, Yaman, dan Suriah adalah contoh nyata bagaimana ketergantungan yang tinggi pada sektor energi tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang memadai dapat memperburuk kondisi sosial. Ketika harga minyak turun atau saat terjadi ketidakstabilan politik, ketergantungan tersebut menjadi bumerang yang memperburuk kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

Sumber daya alam yang melimpah seringkali hanya dimanfaatkan oleh segelintir elit yang memiliki akses kepada pemerintah atau memiliki hubungan patronase dengan penguasa. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana sebagian besar penduduk tidak dapat merasakan dampak positif dari kekayaan yang dimiliki negara mereka. Dalam beberapa kasus, negara-negara Timur Tengah yang bergantung pada sektor energi sering kali terperangkap dalam siklus ketergantungan yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketidakstabilan politik yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, baik yang disebabkan oleh ketegangan sektarian, intervensi asing, maupun konflik internal, semakin memperburuk kondisi ini.

Salah satu hambatan besar terhadap kemakmuran yang merata di negara-negara Timur Tengah adalah sistem patronase yang sangat kuat. Dalam banyak masyarakat, hubungan patron-klien di mana kekuasaan politik dan akses terhadap sumber daya ekonomi ditentukan oleh loyalitas politik, afiliasi etnis, atau jaringan sosial tertentu menciptakan ketimpangan yang besar. Ketika akses terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah atau kelompok tertentu, masyarakat yang tidak terhubung dengan kekuasaan politik terpinggirkan. Hal ini semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketegangan dan konflik sosial yang menghambat pembangunan.

Sebagai contoh, di Irak, meskipun negara ini kaya akan cadangan minyak, distribusi kekayaan yang tidak merata telah menciptakan ketidakadilan sosial. Sebagian besar penduduk Irak masih hidup dalam kemiskinan meskipun negara ini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Ketidakmampuan untuk mendiversifikasi ekonomi dan ketergantungan pada ekspor minyak menjadikan Irak rentan terhadap gejolak harga energi global, yang memperburuk krisis ekonomi dan sosial. Hal yang sama juga terjadi di Yaman, di mana ketergantungan pada sektor energi dan ketidakmampuan untuk mengembangkan sektor-sektor lain mengarah pada ketidakstabilan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, ada contoh positif dari negara-negara yang berhasil mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk menciptakan kemakmuran yang lebih merata. Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar adalah contoh sukses negara-negara yang berhasil melakukan diversifikasi sektor ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Kedua negara ini telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur non-minyak, seperti pariwisata, teknologi, keuangan, dan pendidikan. Sebagai contoh, UEA mengembangkan kota Dubai menjadi pusat keuangan dan pariwisata global yang menarik investasi asing serta menciptakan ribuan lapangan pekerjaan bagi warganya. Dengan mengalihkan fokus dari ketergantungan pada sektor minyak, negara-negara ini mampu menciptakan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat mereka secara keseluruhan.

Selain diversifikasi ekonomi, penting juga untuk membangun sistem pendidikan yang kuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Negara-negara Timur Tengah perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang terbatas, tetapi juga mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam perekonomian global. Ini berarti berinvestasi dalam pendidikan tinggi yang berkualitas, pelatihan teknis, dan riset ilmiah untuk mendorong inovasi dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti teknologi, manufaktur, dan industri kreatif.

Pendidikan yang berkualitas akan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi global dan menciptakan lapangan kerja yang tidak bergantung pada sektor energi. Negara-negara seperti Qatar dan UEA telah berinvestasi dalam pengembangan pendidikan tinggi dan riset, yang tidak hanya menciptakan peluang kerja baru tetapi juga menarik perusahaan internasional untuk membuka cabang di negara-negara tersebut.

Selain itu, untuk mencapai kemakmuran yang lebih merata, kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis pada pemberdayaan sosial sangat penting. Ini mencakup pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti kredit, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Pemberdayaan perempuan, misalnya, harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

### **Stabilitas Politik dan Kemajuan Ekonomi**

Stabilitas politik memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim, terutama yang berada di kawasan Timur Tengah. Ketika stabilitas politik tercapai, pemerintah dapat lebih mudah mengalokasikan sumber daya untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang beragam, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga sektor swasta. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak hanya memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga membuka peluang untuk diversifikasi ekonomi yang lebih luas.

Uni Emirat Arab, dengan pusat keuangan dan pariwisata global di Dubai, adalah contoh yang sangat jelas mengenai hubungan antara stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Dubai, yang dulunya hanya sebuah kota pelabuhan kecil, telah berkembang menjadi salah satu kota paling maju dan makmur di dunia berkat kebijakan pembangunan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, menarik investasi asing, dan mempromosikan sektor pariwisata serta keuangan. Pemerintah UEA telah berhasil mengalokasikan sebagian besar kekayaan minyaknya untuk membangun infrastruktur yang kokoh, seperti gedung pencakar langit yang ikonik, jaringan transportasi yang efisien, dan kawasan bisnis yang modern. Melalui kebijakan yang mendukung sektor-sektor tersebut, UEA berhasil menarik perusahaan-perusahaan global untuk berinvestasi, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, UEA dan Qatar telah berinvestasi besar dalam sektor pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang siap bersaing di tingkat global. Salah satu contohnya adalah pembangunan kampus-kampus internasional yang menawarkan pendidikan kelas dunia. Ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk tidak hanya mengandalkan sektor energi, tetapi juga mengembangkan potensi dalam sektor teknologi, inovasi, dan penelitian. Dengan demikian, stabilitas politik memungkinkan negara-negara ini untuk mengembangkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada sektor minyak dan gas.

Namun, stabilitas politik bukan hanya soal menghindari ketegangan atau konflik bersenjata. Keberlanjutan sistem politik yang stabil harus melibatkan struktur pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Negara yang memiliki stabilitas politik yang baik sering kali mendukung mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi secara aktif. Partisipasi ini bisa melalui kebijakan yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, serta sektor informal dalam merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan. Negara-negara dengan sistem

politik yang lebih terbuka, di mana suara masyarakat dapat didengar, cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, di sisi lain, negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik atau konflik internal yang berkepanjangan sering kali menghadapi hambatan besar dalam mencapai kemajuan ekonomi. Negara-negara seperti Suriah, Irak, dan Libya adalah contoh jelas bagaimana ketidakstabilan politik dapat merusak perkembangan ekonomi dengan cara yang mendalam. Dalam kasus Suriah, perang saudara yang dimulai pada 2011 telah menyebabkan kehancuran infrastruktur fisik yang parah dan menghancurkan banyak sektor ekonomi, termasuk industri, perdagangan, dan sektor jasa. Di samping itu, konflik ini telah menciptakan krisis pengungsi yang besar, yang mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi di negara-negara tetangga seperti Lebanon dan Turki.

Perang dan ketidakstabilan politik sering kali menyebabkan penurunan tajam dalam investasi asing. Investor cenderung menghindari negara-negara yang dilanda konflik karena ketidakpastian yang tinggi dan risiko kehilangan investasi. Sebagai contoh, Irak, yang pernah menjadi salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar, mengalami penurunan besar dalam investasi internasional setelah invasi pada 2003 dan pasca-perang yang menghancurkan infrastruktur dan sistem sosial-ekonominya. Ketidakstabilan yang berkepanjangan menghambat kemampuan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka secara optimal dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, ketidakstabilan sosial juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika sistem politik tidak memberikan rasa aman atau kesejahteraan bagi rakyat, kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun, yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Ini bisa berujung pada ketidakmampuan untuk membangun kapasitas ekonomi di tingkat lokal dan nasional, yang semakin memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, stabilitas yang lebih dalam tidak hanya bergantung pada upaya untuk menciptakan kedamaian politik, tetapi juga pada upaya untuk membangun sistem yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Penting untuk dicatat bahwa stabilitas politik juga harus disertai dengan kebijakan yang mendukung integrasi sosial dan ekonomi. Negara-negara dengan stabilitas politik yang lebih kuat sering kali mampu mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif, yang dapat memperkuat hubungan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, pemerataan kesempatan pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, dapat membantu menciptakan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Stabilitas politik juga dapat memperkuat sektor swasta yang menjadi motor utama dalam pengembangan ekonomi. Negara-negara yang berhasil dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya dengan mengurangi birokrasi dan memberikan insentif bagi pengusaha, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Dengan menciptakan kebijakan yang pro-bisnis, negara dapat memastikan bahwa sektor swasta memiliki peran yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong inovasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hubungan antara stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim sangat jelas. Negara yang berhasil menjaga stabilitas politik mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat mengganggu perkembangan ekonomi, merusak kepercayaan publik, dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, negara-negara mayoritas Muslim perlu fokus pada penciptaan sistem politik yang stabil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

### **Sistem Politik dan Proses Kemandirian Ekonomi**

Sistem politik yang inklusif sangat penting untuk mendorong proses kemandirian ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim. Dalam banyak kasus, sistem politik yang otoriter atau terpusat sering kali menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika sistem politik tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, kebijakan ekonomi cenderung menjadi eksklusif, hanya

menguntungkan segelintir kelompok, dan seringkali memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara-negara dengan sistem politik yang terpusat juga mengalami kesulitan dalam memanfaatkan potensi daerah dan sumber daya lokal secara optimal, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebaliknya, penerapan sistem politik yang desentralistik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar untuk mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan solidaritas dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif. Sistem zakat, yang merupakan kewajiban sosial dalam Islam, dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, membangun jaringan pengaman sosial, dan mendorong solidaritas ekonomi antarwarga. Dengan demikian, dana zakat bisa disalurkan untuk membantu masyarakat yang paling rentan, seperti kelompok miskin, anak-anak, dan perempuan.

Reformasi sosial yang mengedepankan pemberdayaan perempuan juga sangat penting. Dalam banyak negara mayoritas Muslim, perempuan masih menghadapi hambatan dalam berpartisipasi aktif dalam ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang mempromosikan pemberdayaan perempuan, termasuk akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan, dapat menciptakan keseimbangan dalam struktur ekonomi dan sosial. Pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sistem politik yang inklusif, desentralisasi yang tepat, dan kebijakan sosial yang menghormati nilai-nilai keadilan sosial serta pemberdayaan kelompok marginal menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang adil dan berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim.

### **Pendekatan Holistik dalam Pembangunan Politik dan Ekonomi**

Pendekatan holistik dalam pembangunan politik dan ekonomi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya fokus pada stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang efisien, tetapi juga menghormati dan mengintegrasikan sistem budaya dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dapat memberikan dasar yang kuat untuk pembangunan yang relevan dengan konteks sosial, namun juga harus terbuka terhadap inovasi dan kemajuan teknologi modern. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menjadi lebih produktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi global.

Selain itu, kebijakan luar negeri yang berfokus pada kerja sama regional dan global sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada aktor asing, baik dalam hal sumber daya maupun teknologi. Negara-negara mayoritas Muslim dapat memperkuat posisinya di panggung internasional dengan membangun aliansi strategis dan mendorong perdagangan yang saling menguntungkan. Hal ini juga akan mempercepat proses kemandirian ekonomi, dengan membuka peluang pasar baru dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor-sektor yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global.

Pendekatan holistik ini bukan hanya berfokus pada pencapaian kesejahteraan material, tetapi juga berusaha memastikan bahwa keberlanjutan sosial dan pembangunan yang adil dapat tercapai. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses pendidikan, namun, untuk mencapai hasil yang optimal, pemberdayaan masyarakat juga sangat krusial. Masyarakat yang diberdayakan akan menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi lokal dan dapat berkontribusi langsung terhadap kemajuan sosial-ekonomi.

Yang terpenting, kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di dalam masyarakat dapat menciptakan sistem yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu mengurangi potensi ketimpangan sosial, menghindari marginalisasi kelompok tertentu, dan menciptakan ruang bagi partisipasi semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian,

negara-negara mayoritas Muslim dapat mencapai pembangunan politik dan ekonomi yang bukan hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

## KESIMPULAN

Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan ketegangan yang melibatkan aktor internasional telah memengaruhi stabilitas global, khususnya bagi negara-negara mayoritas Muslim. Konflik ini, selain menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, juga berdampak pada ekonomi negara-negara tersebut, yang seringkali bergantung pada sumber daya alam, terutama minyak. Ketergantungan pada komoditas ini membuat negara-negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga energi global, serta memperburuk ketimpangan sosial.

Namun, melalui stabilitas politik yang inklusif, diversifikasi ekonomi, dan perbaikan tata kelola, negara-negara mayoritas Muslim dapat menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Qatar dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keberagaman sektor ekonomi sangat penting untuk mencapai kemakmuran.

Selain itu, pentingnya sistem politik yang mendukung partisipasi masyarakat, penguatan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai lokal juga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada.

Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di negara-negara mayoritas Muslim, perlu ada sinergi antara stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang inklusif, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memfasilitasi harmoni sosial dan kemandirian ekonomi yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angraini, M. (2020). *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Di Timur Tengah (Studi Kasus Nuklir Iran)*. *Global Insight Journal*, 5(1).
- [2] Baker III, J. A., Eagleburger, L. S., Clinton, W. J., Christopher, W. M., & Albright, M. K. (2016). Ronald Reagan (January 1981–January 1989)• Alexander M. Haig (January 1981–July 1982)• George P. Schulz (July 1982–January 1989) George HW Bush (January 1989–January 1993). *Historical Dictionary of United States-Middle East Relations*, 300.
- [3] Effendi, O. (2024). Arab Spring: Perubahan Otoritas, Stabilitas Politik dan Perkembangan Ekonomi di Timur Tengah. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 14(1), 88-112.
- [4] Gause III, F. G. (2009). *The international relations of the Persian Gulf*. Cambridge University Press.
- [5] Hadi, A. (2024). DINAMIKA PEMIKIRAN ISLAM DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 195-207.
- [6] Huntington, S. P. (2004). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Braille Jymico Incorporated.
- [7] Mackinder, H. J. (2017). The geographical pivot of history. In *The Structure of Political Geography* (pp. 162-169). Routledge.
- [8] Obodoruku, B. (2017). Refugees and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): Information Access and Information Services.
- [9] Rahmatulummah, A., & Resky, S. A. (2024). Eskalasi Konflik Iran-Israel di Damaskus: Implikasi terhadap Stabilitas Keamanan Regional dan Global. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1), 49-68.
- [10] Ross, M. L. (2012). *The oil curse: How petroleum wealth shapes the development of nations*. Princeton University Press.
- [11] Yergin, D. (2011). *The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the*